

## **Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19**

**Hamjah Bonso<sup>1</sup>, Irwan<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak.

Program Studi Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak.

### **Abstrak**

Kolaborasi antara pemerintah dengan swasta menjadi penting dalam penanganan bencana. Penelitian tentang kolaborasi swasta dengan pemerintah sangat penting untuk dilakukan saat ini, peran Negara sebagai satu-satunya aktor tunggal yang mampu melaksanakan segala hal mulai hilang relevansinya saat ini, olehnya itu peran negara haruslah diminimalisir dan penguatan peran sektor swasta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library search), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kolaborasi merupakan cara alternatif yang mungkin untuk segera menanggapi pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses sektor swasta. Serta diantara bentuk kolaborasi yaitu: sosialisasi bahaya Covid-19, pembagian masker, produksi dan penyemprotan disinfektan, pembagian hand sanitizer.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Covid-19.*

### **PENDAHULUAN**

Peran serta dari berbagai pihak sangat dibutuhkan saat ini, virus disease 2019 adalah virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang menggemparkan dunia pada awal tahun 2020 adapun penyakitnya disebut corona virus disease Covid-19), kota Wuhan Tiongkok merupakan tempat asal mula dari virus tersebut, penyakit tersebut muncul pada akhir Desember 2019 (Yuliana, 187:2020). Lebih lanjut, menurut (Noviyanti, 2021) seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya wabah yang diberi nama coronavirus baru. Coronavirus baru itu pertama kali diidentifikasi pada 31

desember 2019 di Wuhan, China. Salah satu Negara yang terkena dan merasakan dampak dari virus Corona adalah Indonesia, kasus Covid-19 menyebar di 34 Provinsi di Indonesia dan itu berdasarkan data yang masuk.

Bencana pandemi Covid-19 menjadikan berbagai organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana pandemic covid-19. Menurut (Abdusshomad, 2020) salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan bertambahnya korban jiwa adalah menyiapkan penanganan. Lebih lanjut, Indonesia adalah termasuk salah satu



Negara di dunia yang resah akibat menularnya Covid-19. Banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti penanganan virus Covid-19 karena Covid-19 merupakan virus jenis baru. (Telaumbanua, 2020). Adanya keterbatasan yang dimiliki Negara dalam melakukan aksi penanggulangan bencana pandemi covid-19 membutuhkan adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Kolaborasi merupakan kerjasama berbagai pihak dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan. Menurut Agustina (2017) lemahnya koordinasi antara pemerintah dan para pihak terkait lainnya merupakan penyebab adanya berbagai kendala yang dialami dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Collaborative merupakan tanggapan atas pergeseran-pergeseran maupun perubahan-perubahan lingkungan kebijaksanaan. Perubahan-perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk jumlah pelaku kebijaksanaan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas. Menurut Mutiarawati dan Sudarmo (2017) kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti *normative* merupakan konsep kolaborasi. Serangkaian proses atau cara

mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional merupakan definisi kolaborasi dalam arti sempit. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi ini bisa terdiri dari institusi pemerintah saja, LSM lokal saja, swasta saja atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah lalu berkolaborasi dengan LSM-LSM setempat yang didanai oleh pihak pemerintah/ swasta/ LSM/ penyandang dana dari luar negeri. Lebih lanjut, aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan partner atau mitranya merupakan definisi kolaborasi dalam arti *normative*.

Konsep kolaborasi merupakan kerjasama yang melibatkan antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya, dan aktivitas. Dimana institusi pada dasarnya memiliki tujuan dan berusaha mewujudkannya (Fosler, 2002). Lebih lanjut, menurut Balogh et.al (2011) *Collaborative* merupakan sebuah proses dan struktur



dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan maupun instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Menurut Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam pemerintahan merupakan Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Menurut Agustiani (2017) dalam kerjasama kolaboratif masing-masing diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak yang sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya suatu keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu

organisasi public dengan mitranya dari organisasi di sector privat. Dalam kerjasama kolaboratif, visi bersama menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi, sumberdaya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut. Kolaborasi merupakan upaya bersama dari lembaga pemerintah dan warga yang peduli, dengan menggunakan istilah pemangku kepentingan yang merujuk pada partisipasi warga sebagai individu dan partisipasi kelompok terorganisir.

Penyakit Corona Virus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderitayang paling rentan, penyakit ini dapat berujungpada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan



(*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/ *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya

tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan Collaborative Governance. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Collaborative Governance. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19**

Menurut (Wibowo & Afriyani, 2021) pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ada empat pilar komunikasi publik yang terkait dengan COVID-19 antara lain: Himbauan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan akses informasi ke media, pengarusutamaan gerakan cuci tangan pakai sabun. Kolaborasi merupakan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolaborasi merupakan proses sosial yang paling dasar yang biasanya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap pihak yang terlibat mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Dalam mempercepat penanggulangan pandemi covid-19, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah pusat maupun pemerintah

di daerah membutuhkan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi dari beberapa elemen yang terkait individu, lembaga, maupun pihak-pihak terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima dari suatu akibat dan manfaat yang secara langsung dirasakan. Dalam suatu kerjasama yang dilakukan antara pihak terkait adalah pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.

Bencana yang melanda, seperti fenomena cuaca ekstrim, serangan teroris dan pandemi, memerlukan tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa, membatasi kerusakan dan memungkinkan krisis segera diatasi. Semua pihak diharapkan dapat bekerjasama dalam penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah sangat diharapkan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan publik, dalam situasi bencana atau krisis, tindakan cepat oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan



keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, tidaklah mungkin bagi pemerintah untuk selalu memiliki struktur yang hanya diperlukan pada saat terjadi bencana besar. Salah satu bagian tak terpisahkan dari keberhasilan dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 adalah kerjasama yang kuat dan cepat antara pemerintah dan pihak swasta. Kolaborasi merupakan cara alternatif yang mungkin untuk segera menanggapi pandemi Covid-19 adalah dengan memanfaatkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan proses sektor swasta. Tata kelola kolaborasi sebagai aktivitas formal yang melibatkan kegiatan bersama, struktur bersama dan sumber daya bersama. Lebih lanjut, tata kelola kolaborasi menekankan pentingnya hubungan baik yang sudah ada sebelumnya antara berbagai aktor agar kolaborasi berhasil.

Menurut (Bayu Nurrohman, Yebi Ma'asan Mayrudin, 2021) penyebaran wabah Covid-19 yang massif diperlukan

upaya kreatif dari para pemangku kepentingan khususnya pimpinan daerah. Aktivisme peran aktor non-pemerintahan baik secara individu maupun komunitas telah terlihat menunjukkan empati dan solidaritasnya terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19. Menurut (Rahmawati et al., 2021) kolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang muncul. Kolaborasi esensinya adalah perwujudan partisipasi aktor eksternal yaitu swasta dan masyarakat, juga berkaitan dengan pembagian tugas atas keputusan yang sudah dibuat (Arisanti & Suderana, 2020).

### **Bentuk Kolaborasi Dalam Penanganan Covid-19**

#### **1. Sosialisasi Bahaya Covid-19**

Sosialisasi adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kontrol sosial agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lebih lanjut, dimasa pandemic Covid-19 ini kepedulian antar sesama sangat



diperlukan. Sosialisasi bahaya Covid-19 diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada, menjaga kebersihan dan tetap di rumah agar bisa membantu memutus rantai penyebaran Covid-19.

## **2. Pembagian Masker**

Pemerintah menetapkan skenario new normal di berbagai lini, dimana pada kondisi new normal pada sebagian masyarakat mulai menjalani rutinitas di luar rumah. Pada kondisi new normal, pemerintah tetap memberlakukan protocol penggunaan masker sebagai salah satu bentuk untuk mencegah penularan Covid-19. Lebih lanjut, untuk mendukung program dan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah bersama pihak swasta bekerjasama melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat.

## **3. Produksi dan Penyemprotan Disinfektan**

Penyebaran virus Covid-19 yang semakin membuat masyarakat waspada, pemerintah dan masyarakat

melakukan berbagai cara untuk mencegah penularan Covid-19.

## **4. Pembagian Hand Sanitizer**

Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan yang digunakan sebagai alternative untuk mencuci tangan selain menggunakan sabun dan air. Hand sanitizer berbasis alcohol dengan minimal 60% dipercaya lebih efektif untuk membunuh kuman dan mikroorganismenya berbahaya di tangan termasuk pencegahan virus corona.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penanganan Covid-19. Adapun bentuk kegiatan diantaranya: sosialisasi bahaya pandemi Covid-19, pembagian masker, pembagian hand sanitizer, pembagian sembako, melakukan produksi dan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah-sekolah serta tempat lainnya yang dianggap rawan penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dwi. 2017. Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Transparansi*. Volume 9 (1). 12i2.407
- Ansell and Gash, 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Oxford University Press.
- Balogh, S, et al, 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance* *Journal of Public Administration Research and Theory*. Oxford University Press.
- Fosler, R.S. 2002. *Working Better Together: How Government, Business, and Profit Organizations Can Achieve Public Purposes Through Cross Sector Collaborations, Alliances, and Partnerships*. Washington DC, *Disaster Prevention and Management*, 13(2). Pp.140-152.
- Mutiawati T, Sudarmo, 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. *Jurnal Wacana Publik*. Volume 1 (2).
- Abdusshomad, A. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Penerapan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Islam. *Qalamuna*, 12(2), 107-115. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.407>
- Arisanti, N. M. D., & Suderana, I. W. (2020). Penanganan Pandemi Covid-19: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bersama Knpi Gianyar Di Kabupaten Gianyar, Bali. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 87. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.430>
- Bayu Nurrohman, Yebi Ma'asan Mayrudin, M. D. H. (2021). Penguatan Kolaborasi dan Sinergi di Level Desa Dalam Menangani. *Komunitas*, 1(1), 1-8.
- Edyanto, Karsiman. 2018. "Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw)." *Sosio e-kons* 10(2): 143.
- Noviyanti, S. (2021). Tata Kelola Negara Turki Dalam Menangani Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 21-34.
- Rahmawati, Y., Anugrah, F. F., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2021). Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19. *JSDS*, 2(1), 39-51.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.



*Qalamuna*, 12(1), 59-70.

Wibowo, M. T. H., & Afriyani, A. (2021).  
Strategi Kebijakan, Tata Kelola  
Pemerintahan Dalam Penanganan  
Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

*Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 1-14.

Yuliana, 2020. Corona Virus Diseases  
(Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur.  
*Jurnal Wellness And Healthy  
Magazine*. Volume 2 (1). Bandar  
Lampung.